



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Hari/Tanggal	: Selasa, 2 September 2015
Masa Persidangan	: I
Jenis rapat	: Rapat Kerja
Rapat ke	:
Sifat Rapat	: Terbuka
Dengan	: Menteri Kesehatan RI
Waktu	: Pukul 14.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Penjelasan Pemerintah atas sikap yang diambil terkait Peraturan BPJS Kesehatan No.2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP. 2. Evaluasi penggunaan metode INA-CBGs (<i>Indonesian Case Based Groups</i>) untuk menentukan tarif berobat di rumah sakit. 3. Penjelasan secara detail dan laporan perkembangan mengenai persiapan pelayanan kesehatan haji Tahun 2015, termasuk laporan lengkap pelaksanaan kesehatan haji Tahun 2014. 4. Penjelasan/laporan mengenai pelaksanaan program/kegiatan prioritas Tahun 2015 pada semester I termasuk penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan RI.
Ketua Rapat	: Dra. Hj. Ermalena MHS/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat	: Muhammad Yus Iqbal, SE/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. orang dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI;

B. Menteri Kesehatan RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.05 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 251 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Dengan semangat pembangunan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dengan kewenangannya untuk menginstruksikan BPJS Kesehatan mencabut Peraturan BPJS Kesehatan No 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan FKTP.
2. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan RI untuk segera menyelesaikan peninjauan tarif INA-CBGs sehingga dapat diberlakukan tarif baru pada awal tahun 2016.
3. Mengingat pelaksanaan ibadah haji masih berlangsung, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk secara terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesehatan, termasuk pengawasan kualitas pelayanan kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar.
4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan langkah-langkah percepatan realisasi belanja barang dan modal sehingga target penyerapan anggaran tahun 2015 dapat tercapai.
5. Khusus untuk peningkatan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2015, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota pada Rapat Kerja hari ini paling lambat tanggal 7 September 2015.

Rapat diakhiri pukul 19.15 WIB

MENTERI KESEHATAN RI,



Prof. Dr. dr. NILA DJUWITA F. MOELOEK, Sp.M

(K)

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



Dra. Hj. ERMALENA MHS

A-536